BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*) *Website* www.bpkp.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: KP.00.01/PENG-2/SU/02/2026

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 640 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2026, BPKP mengundang Putra-Putri terbaik Indonesia yang memenuhi syarat, memiliki integritas, dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan BPKP, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan CPNS

Kebutuhan CPNS BPKP Tahun Anggaran (TA) 2026 berjumlah 2.007 (dua ribu tujuh) yang terdiri dari 10 (sepuluh) Jabatan dengan rincian dan kualifikasi pendidikan sebagaimana terdapat pada **Lampiran I** Pengumuman ini. Sebaran alokasi unit kerja penempatan CPNS dapat dilihat pada **Lampiran II** Pengumuman ini.

2. Jenis Formasi Kebutuhan CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS BPKP TA 2026 meliputi:

a. **Kebutuhan Umum** dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. **Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** dialokasikan khusus bagi penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat kedisabilitasannya.

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang berasal dari institusi perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi pada pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
g. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (dari skala 4.00);
h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BPKP.

2. Persyaratan Khusus

Khusus bagi Kebutuhan Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa dokumen tambahan yang harus diunggah sebagai berikut:

a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
b. Menyampaikan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Tautan video harus dapat diakses oleh Panitia Seleksi pada saat Seleksi Administrasi.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai tanggal 27 November s.d. 21 Desember 2026 dengan alur sebagai berikut:

a. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
   1) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK Pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
   2) Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
   3) Mengunggah *scan* KTP dan berswafoto menggunakan pakaian formal;
   4) Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan

5) Mencetak Kartu Informasi Akun.

b. Pelamar *login* pada laman SSCASN dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;

c. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas agar memilih “non disabilitas”, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas agar memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya disertai dengan mengisi tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas yang relevan dengan jabatan yang dilamar);

d. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu CPNS;

e. Pelamar memilih instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), kualifikasi pendidikan, jabatan yang akan dilamar, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama institusi pendidikan / perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi;

f. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
   1) *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
   2) Transkrip Nilai Asli (bukan Transkrip Sementara, bukan fotokopi, maupun fotokopi yang dilegalisasi), bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   3) Surat Pernyataan dan Surat Lamaran dengan poin-poin sesuai **Lampiran III** Pengumuman ini yang diisi dan diunduh dari SSCASN dan sudah ditandatangani serta dibubuhi meterai;
   4) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (**Khusus bagi Pelamar Penyandang Disabilitas**);

g. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca dengan jelas (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan

h. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (data yang telah diisi pelamar sudah tidak bisa diubah).

2. Tahapan dan Mekanisme Seleksi

Tahapan Seleksi CPNS BPKP TA 2026 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan di antaranya menggunakan sistem gugur, yang meliputi:

a. Seleksi Administrasi

   Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman SSCASN dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan oleh BKN sesuai dengan pilihan pelamar. SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat memilih untuk mengikuti SKD atau dapat menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN TA 2024. Kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelamar formasi Umum
   a) TWK minimal 65 (enam puluh lima)
   b) TIU minimal 80 (delapan puluh)
   c) TKP minimal 166 (seratus enam puluh enam)
2) Pelamar formasi Penyandang Disabilitas
   a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam)
   b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)

Jumlah peserta lulus SKD yang berhak mengikuti tahapan berikutnya (SKB) paling banyak sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang terdiri dari:
   1) SKB menggunakan CAT dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh BKN sesuai dengan pilihan pelamar;
   2) SKB Tambahan yang terdiri dari:
      a) Psikotes, dengan nilai ambang batas minimal sebesar **61** (enam puluh satu); dan
      b) Wawancara.

Hasil akhir seleksi CPNS BPKP TA 2026 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai seluruh tahapan seleksi, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Tahapan Seleksi		Bobot	Total
1.	SKD (40%)			40.00%
2.	SKB (60%)	SKB dengan CAT	50.00%	30.00%
		SKB Tambahan (Psikotes)	40.00%	24.00%
		SKB Tambahan (Wawancara)	10.00%	6.00%
	Total			**100.00%**

3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)
1	Pengumuman Seleksi	27 November 2026
2	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 4 Januari 2027

No	Kegiatan	Tanggal*)
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 s.d. 8 Januari 2027
5	Masa Sanggah	9 s.d. 11 Januari 2027
6	Jawab Sanggah	9 s.d. 13 Januari 2027
7	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	27 Januari s.d. 1 Februari 2027
11	Pelaksanaan SKD CPNS	2 s.d. 21 Februari 2027
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13	Pengumuman Hasil SKD CPNS	1 s.d. 7 Maret 2027
14	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	30 Maret s.d. 6 April 2027
19	Pelaksanaan SKB CPNS Tambahan	3 s.d. 12 April 2027
20	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Pasca Sanggah	29 April s.d. 2 Mei 2027
26	Pengisian DRH CPNS	3 s.d. 17 Mei 2027
27	Usul Penetapan NIP CPNS	8 s.d. 22 Mei 2027

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

D. LAIN-LAIN

1. Pada seluruh proses pendaftaran dan tahapan seleksi, peserta **tidak dipungut biaya** apapun;
2. Biaya akomodasi terkait dengan pelaksanaan rangkaian seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
3. BPKP tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan BPKP dan/atau Panitia Seleksi Instansi yang terkait dengan kegiatan seleksi;

4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BPKP atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut;
5. Peserta yang tidak hadir dalam salah satu tahapan seleksi atau lebih pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan alasan apapun dinyatakan **GUGUR**;
6. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, BPKP berhak menggugurkan kelulusan peserta tersebut, memberhentikan sebagai CPNS, dan/atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS BPKP wajib menjalani ikatan wajib kerja selama 5 (lima) tahun;
8. Peserta yang mengundurkan diri selama menjalani ikatan wajib kerja dikenakan sanksi ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Seluruh peserta seleksi diimbau untuk mengikuti dan memantau informasi-informasi terkait proses seleksi melalui portal resmi rekrutmen BPKP https://rekrutmen.bpkp.go.id, laman resmi BPKP https://www.bpkp.go.id, dan media sosial resmi BPKP;
10. Pertanyaan terkait dengan proses seleksi hanya dapat dilakukan melalui surel rekrutmen@bpkp.go.id;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
12. Pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam proses seleksi CPNS BPKP dapat dilakukan melalui https://wbs.bpkp.go.id;
13. Keputusan Panitia Seleksi CPNS BPKP TA 2026 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

27 November 2026

Sekretaris Utama
selaku Ketua Panitia Seleksi

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Mas Aris Santosa

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Lampiran I
Pengumuman Seleksi Pengadaan PNS BPKP TA 2026
Nomor : KP.00.01/PENG-2/SU/02/2026
Tanggal : 27 November 2026

RINCIAN JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BPKP TA 2026

<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Deskripsi Pekerjaan</th><th>Kisaran Penghasilan (Rupiah)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>Auditor Ahli Pertama (Rumpun Akuntansi)
1.050 formasi</td><td>Melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional dengan kompleksitas tinggi dalam audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lainnya, serta dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan</td><td>9.600.000,00
s.d.
11.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Kualifikasi Pendidikan</u>:
D-IV Akuntansi; D-IV Akuntansi Bank Syariah; D-IV Akuntansi dan Perbankan; D-IV Akuntansi Keuangan; D-IV Akuntansi Keuangan Perusahaan; D-IV Akuntansi Keuangan Publik; D-IV Akuntansi Komputer; D-IV Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah; D-IV Akuntansi Manajemen; D-IV Akuntansi Perpajakan; D-IV Akuntansi Sektor Publik; D-IV Analisis Keuangan; D-IV Ekonomi; D-IV Ekonomi Akuntansi; D-IV Ekonomi Akuntansi Sektor Publik; D-IV Ekonomi Keuangan; D-IV Ekonomi Pembangunan; D-IV Ekonomi Publik; D-IV Ekonomi Syariah; D-IV Ekonomi Terapan; D-IV Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan; D-IV Ilmu Akuntansi; D-IV Ilmu Ekonomi; D-IV Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; D-IV Ilmu Ekonomi Manajemen; D-IV Keuangan Daerah; D-IV Komputer Akuntansi; D-IV Komputerisasi Akuntansi; D-IV Perbankan dan Keuangan Digital; S-1 Akuntansi; S-1 Akuntansi dan Perbankan; S-1 Akuntansi Ekonomi; S-1 Akuntansi Islam; S-1 Akuntansi Keuangan; S-1 Akuntansi Keuangan Publik; S-1 Akuntansi Komputer; S-1 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah; S-1 Akuntansi Manajemen; S-1 Akuntansi Manajemen Pemerintahan; S-1 Akuntansi Manajemen Perpajakan; S-1 Akuntansi Manajerial; S-1 Akuntansi Negara; S-1 Akuntansi Perpajakan; S-1 Akuntansi Sektor Publik; S-1 Akuntansi Syariah; S-1 Ekonomi Akuntansi; S-1 Ekonomi Pembangunan; S-1 Ekonomi Syariah; S-1 Ilmu Akuntansi; S-1 Komputer Akuntansi; S-1 Komputerisasi Akuntansi; S-1 Sistem Informasi Akuntansi</td></tr>
<tr><td>Auditor Ahli Pertama (Rumpun Manajemen)
150 formasi</td><td>Melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional dengan kompleksitas tinggi dalam audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lainnya, serta dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan</td><td>9.600.000,00
s.d.
11.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Kualifikasi Pendidikan</u>:
D-IV Ekonomi Manajemen; D-IV Ilmu Manajemen; D-IV Manajemen; D-IV Manajemen Akuntansi; D-IV Manajemen Aset; D-IV Manajemen Bisnis; D-IV Manajemen Bisnis Internasional; D-IV Manajemen Keuangan; D-IV Manajemen Keuangan dan Perbankan; D-IV Manajemen Keuangan Negara; D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik; S-1 Bisnis dan Manajemen; S-1 Ekonomi Manajemen; S-1 Ilmu Manajemen; S-1 Manajemen; S-1 Manajemen Akuntansi; S-1 Manajemen Aset; S-1 Manajemen Bisnis; S-1 Manajemen Bisnis Internasional; S-1 Manajemen Bisnis Syariah; S-1 Manajemen Ekonomi; S-1 Manajemen Keuangan; S-1 Manajemen Keuangan dan Perbankan; S-1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah; S-1 Manajemen Keuangan Syariah; S-1 Manajemen Pembangunan; S-1 Manajemen Pemerintahan; S-1 Manajemen Perusahaan</td></tr>
</table>

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Kisaran Penghasilan (Rupiah)
	Auditor Ahli Pertama (Rumpun Teknologi Informasi) 225 formasi	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional dengan kompleksitas tinggi dalam audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lainnya, serta dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Ilmu Komputer; D-IV Informatika; D-IV Manajemen Informasi; D-IV Manajemen Informatika; D-IV Manajemen Sistem Informasi; D-IV Sistem Informatika; D-IV Teknik Informatika; D-IV Teknik Komputer dan Informatika; S-1 Ilmu Komputer; S-1 Informatika; S-1 Manajemen Informasi; S-1 Manajemen Informatika; S-1 Sistem Informatika; S-1 Sistem Komputer; S-1 Teknik Informatika; S-1 Teknik Komputer; S-1 Teknik Komputer dan Informatika		
	Auditor Ahli Pertama (Rumpun Teknik Sipil) 75 formasi	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional dengan kompleksitas tinggi dalam audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lainnya, serta dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Konstruksi Bangunan; D-IV Konstruksi Bangunan Gedung; D-IV Konstruksi Sipil; D-IV Manajemen Konstruksi; D-IV Manajemen Rekayasa Konstruksi; D-IV Rekayasa Konstruksi; D-IV Teknik Konstruksi; D-IV Teknik Konstruksi Bangunan; D-IV Teknik Sipil; D-IV Teknik Sipil Bangunan Gedung; D-IV Teknik Sipil dan Perencanaan; S-1 Konstruksi Bangunan; S-1 Konstruksi Sipil; S-1 Manajemen Rekayasa Konstruksi; S-1 Teknik Konstruksi; S-1 Teknik Konstruksi Bangunan; S-1 Teknik Sipil; S-1 Teknik Sipil Bangunan Gedung; S-1 Teknik Sipil dan Perencanaan		
2	**Arsiparis Ahli Pertama** 10 formasi	Melakukan pengelolaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk/pedoman kearsipan, penyimpanan arsip, pelayanan kearsipan, mempublikasikan kearsipan, pengkajian/pengembangan kearsipan, dan pembinaan serta pengawasan kearsipan.	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Kearsipan; D-IV Kearsipan dan Informasi Digital; D-IV Kearsipan Digital; D-IV Layanan Publik; D-IV Manajemen Rekod dan Arsip; D-IV Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi; D-IV Perpustakaan Digital; D-IV Sistem Informasi Bisnis; S-1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan; S-1 Ilmu Perpustakaan; S-1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam; S-1 Kearsipan; S-1 Perpustakaan dan Sains Informasi; S-1 Studi Pemerintahan		

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Kisaran Penghasilan (Rupiah)
3	**Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama** 67 formasi	Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan, menyusun informasi strategis pemerintah, menyusun berita/naskah pelayanan informasi dan kehumasan, menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi sebagai anggota, menyusun bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka pelayanan hubungan internal dan eksternal serta mengumpulkan data dan menyusun instrumen dalam rangka audit komunikasi	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Desain Komunikasi Visual; D-IV Hubungan Masyarakat; D-IV Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital; D-IV Ilmu Komunikasi; D-IV Komunikasi; D-IV Komunikasi Digital; D-IV Komunikasi Informasi Publik; D-IV Komunikasi Massa; D-IV Manajemen Informasi Komunikasi; D-IV Teknik Informatika; S-1 Desain Komunikasi; S-1 Desain Komunikasi Visual; S-1 Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Komunikasi Bisnis; S-1 Ilmu Komunikasi dan Humas; S-1 Jurnalistik; S-1 Komunikasi; S-1 Komunikasi Massa; S-1 Komunikasi Publik; S-1 Manajemen Informasi Komunikasi; S-1 Media dan Komunikasi; S-1 Sains Komunikasi; S-1 Teknik Informatika		
4	**Analis Anggaran Ahli Pertama** 5 formasi	Mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan dalam proses penganggaran, implementasi anggaran, dan pengawasan implementasi anggaran di lingkungan BPKP	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Administrasi Keuangan Negara; D-IV Akuntansi; D-IV Akuntansi Keuangan; D-IV Akuntansi Keuangan Publik; D-IV Keuangan; D-IV Komputerisasi Akuntansi; D-IV Manajemen Keuangan; D-IV Manajemen Keuangan Negara; S-1 Administrasi Keuangan; S-1 Akuntansi; S-1 Akuntansi Keuangan; S-1 Komputerisasi Akuntansi; S-1 Manajemen Keuangan; S-1 Manajemen Keuangan Negara; S-1 Manajemen Perbendaharaan; S-1 Sistem Informasi Akuntansi		
5	**Statistisi Ahli Pertama** 8 formasi	Melakukan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik pada organisasi instansi pemerintah dalam rangka penyiapan bahan penyusunan kebijakan	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Ilmu Statistik; D-IV Komputasi Statistik; D-IV Statistik; D-IV Statistika; D-IV Statistika Bisnis; D-IV Statistika Ekonomi; D-IV Statistika Keuangan; S-1 Ilmu Statistik; S-1 Komputasi Statistika; S-1 Statistik; S-1 Statistika; S-1 Statistika Bisnis; S-1 Statistika dan Sains Data; S-1 Statistika Ekonomi; S-1 Statistika Keuangan		
6	**Analis Hukum Ahli Pertama** 5 formasi	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	9.600.000,00 s.d. 11.500.000,00

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Kisaran Penghasilan (Rupiah)
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Hukum; D-IV Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan; D-IV Hukum Tata Negara; D-IV Ilmu Hukum; S-1 Hukum; S-1 Hukum Administrasi; S-1 Hukum Administrasi Negara; S-1 Hukum Tata Negara; S-1 Ilmu Hukum; S-1 Ilmu Hukum Tata Negara		
7	**Konselor Sumber Daya Manusia** 18 formasi	Melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling untuk kelancaran pelaksanaan tugas	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Bimbingan dan Konseling; D-IV Ilmu Psikologi; D-IV Konseling; D-IV Pendidikan Bimbingan Konseling; D-IV Psikologi; S-1 Bimbingan dan Konseling; S-1 Ilmu Psikologi; S-1 Konseling; S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling; S-1 Psikologi		
8	**Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Keuangan)** 41 formasi	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan, analisis, dan penelaahan kebijakan di bidang keuangan	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Administrasi Keuangan Negara; D-IV Akuntansi; D-IV Akuntansi Keuangan; D-IV Akuntansi Keuangan Publik; D-IV Keuangan; D-IV Komputerisasi Akuntansi; D-IV Manajemen Keuangan; D-IV Manajemen Keuangan Negara; S-1 Administrasi Keuangan; S-1 Akuntansi; S-1 Akuntansi Keuangan; S-1 Komputerisasi Akuntansi; S-1 Manajemen Keuangan; S-1 Manajemen Keuangan Negara; S-1 Manajemen Perbendaharaan; S-1 Sistem Informasi Akuntansi		
	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kehumasan) 69 formasi	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan, analisis, dan penelaahan kebijakan di bidang hubungan kemasyarakatan	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Desain Komunikasi Visual; D-IV Hubungan Masyarakat; D-IV Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital; D-IV Ilmu Komunikasi; D-IV Komunikasi; D-IV Komunikasi Digital; D-IV Komunikasi Informasi Publik; D-IV Komunikasi Massa; D-IV Manajemen Informasi Komunikasi; D-IV Teknik Informatika; S-1 Desain Komunikasi; S-1 Desain Komunikasi Visual; S-1 Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Komunikasi Bisnis; S-1 Ilmu Komunikasi Dan Humas; S-1 Komunikasi; S-1 Komunikasi Massa; S-1 Komunikasi Publik; S-1 Manajemen Informasi Komunikasi; S-1 Media Dan Komunikasi; S-1 Sains Komunikasi; S-1 Teknik Informatika		
	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bahan Bantuan Hukum) 20 formasi	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan, analisis, dan penelaahan kebijakan di bidang layanan bantuan hukum	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Hukum; D-IV Hukum Ketatanegaraan Dan Pemerintahan; D-IV Hukum Tata Negara; D-IV Ilmu Hukum; S-1 Hukum; S-1 Hukum Administrasi; S-1 Hukum Administrasi Negara; S-1 Hukum Tata Negara; S-1 Ilmu Hukum; S-1 Ilmu Hukum Tata Negara		
	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis BMN dan PBJ) 38 formasi	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan, analisis, dan penelaahan kebijakan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Kisaran Penghasilan (Rupiah)
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Manajemen Aset; D-IV Manajemen Aset Negara; D-IV Manajemen Aset Publik; D-IV Manajemen Aset Sektor Publik; D-IV Manajemen Logistik; S-1 Manajemen Aset; S-1 Manajemen Aset Publik; S-1 Manajemen Logistik		
	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Diklat) 5 formasi	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan, analisis, dan penelaahan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Administrasi Pendidikan; D-IV Manajemen Pendidikan; S-1 Administrasi Pendidikan; S-1 Manajemen Pendidikan		
	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Layanan Umum) 13 formasi	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan, analisis, dan penelaahan kebijakan di bidang layanan umum	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Administrasi Perkantoran; D-IV Manajemen; D-IV Manajemen Administrasi; D-IV Manajemen Bisnis; D-IV Manajemen Informasi; D-IV Manajemen Kearsipan; S-1 Administrasi Perkantoran; S-1 Manajemen; S-1 Manajemen Administrasi; S-1 Manajemen Bisnis; S-1 Manajemen Informasi		
9	**Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Keuangan)** 43 formasi	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data serta laporan di bidang pengelolaan keuangan	7.700.000,00 s.d. 9.200.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-III Administrasi Keuangan; D-III Administrasi Keuangan Negara; D-III Administrasi Perpajakan; D-III Ilmu Administrasi Perpajakan; D-III Manajemen Administrasi Akuntansi; D-III Manajemen Administrasi Keuangan		
	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Diklat) 18 formasi	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data serta laporan di di bidang penyelenggaraan diklat	7.700.000,00 s.d. 9.200.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-III Administrasi Pendidikan; D-III Komunikasi; D-III Manajemen Informasi; D-III Manajemen Informatika; D-III Manajemen Pendidikan; D-III Sistem Informasi; D-III Teknik Komputer; D-III Teknologi Informasi; D-III Teknologi Sistem Informasi		
	Pengolah Data dan Informasi (Sekretaris) 56 formasi	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyiapan bahan, pengaturan jadwal pimpinan serta laporan di bidang kesekretariatan	7.700.000,00 s.d. 9.200.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-III Administrasi Kesekretariatan; D-III Administrasi Perkantoran Dan Sekretaris; D-III Administrasi Sekretaris; D-III Ilmu Kesekretariatan; D-III Kesekretariatan; D-III Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran; D-III Manajemen Perkantoran; D-III Sekretaris; D-III Sekretaris, Komputer Dan Manajemen		
	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Layanan Umum) 55 formasi	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data serta laporan pengelolaan layanan umum	7.700.000,00 s.d. 9.200.000,00

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Kisaran Penghasilan (Rupiah)
	Kualifikasi Pendidikan: D-III Administrasi; D-III Administrasi Bisnis; D-III Administrasi Perkantoran; D-III Administrasi Perusahaan; D-III Administrasi Publik; D-III Ilmu Administrasi; D-III Ilmu Administrasi Negara; D-III Ilmu Administrasi Pemerintahan; D-III Ilmu Administrasi Perkantoran; D-III Manajemen Administrasi; D-III Manajemen Administrasi Perkantoran		
10	**Penata Keprotokolan** 36 formasi	Melakukan kegiatan perencanaan, koordinasi, dan melaksanakan tata keprotokolan terkait dengan acara-acara kedinasan, kunjungan tamu, serta kegiatan pimpinan	8.300.000,00 s.d. 10.000.000,00
	Kualifikasi Pendidikan: D-IV Administrasi Pemerintah; D-IV Hubungan Masyarakat; D-IV Ilmu Hubungan Masyarakat; D-IV Ilmu Komunikasi; D-IV Ilmu Pemerintahan; D-IV Komunikasi; D-IV Komunikasi Hubungan Masyarakat; D-IV Komunikasi Informasi Publik; D-IV Manajemen Informasi Komunikasi; D-IV Manajemen Komunikasi; D-IV Manajemen Media Dan Komunikasi; S-1 Administrasi Pemerintah; S-1 Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Pemerintahan; S-1 Komunikasi; S-1 Komunikasi Hubungan Masyarakat; S-1 Manajemen Komunikasi; S-1 Manajemen Media Dan Komunikasi		

Lampiran II
Pengumuman Seleksi Pengadaan PNS BPKP TA 2026
Nomor : KP.00.01/PENG-2/SU/02/2026
Tanggal : 27 November 2026

RINCIAN ALOKASI PENEMPATAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BPKP TA 2026

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
1	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	20
2	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	20
3	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	20
4	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	20
5	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	20
6	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Deputi Bidang Investigasi	20
7	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Inspektorat	3
8	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	5
9	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	5
10	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	42
11	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	28
12	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	28
13	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	32
14	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	32
15	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	29

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
16	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	28
17	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	25
18	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	7
19	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	6
20	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	6
21	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	7
22	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	6
23	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	31
24	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	35
25	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	33
26	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	30
27	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	29
28	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	28
29	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	25
30	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	25
31	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	25
32	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	28

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
33	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	32
34	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	26
35	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	23
36	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	31
37	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	24
38	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30
39	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	7
40	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	31
41	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	42
42	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	32
43	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	32
44	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	21
45	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Akuntansi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	21
46	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	3
47	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	3
48	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	3

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
49	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	3
50	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	3
51	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Deputi Bidang Investigasi	3
52	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Inspektorat	1
53	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	1
54	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	1
55	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	7
56	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	4
57	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	4
58	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	5
59	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	5
60	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	4
61	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	4
62	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	3
63	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
64	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1
65	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
66	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	1
67	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1
68	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	5
69	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	5
70	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	5
71	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	4
72	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	4
73	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	4
74	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	3
75	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	3
76	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	3
77	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	4
78	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
79	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	4
80	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	3
81	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	4
82	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	4

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
83	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
84	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
85	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	4
86	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	6
87	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	4
88	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	4
89	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	3
90	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Manajemen	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	3
91	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	4
92	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	4
93	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	4
94	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	4
95	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	4
96	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Deputi Bidang Investigasi	4
97	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Inspektorat	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
98	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	1
99	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	1
100	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	9
101	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	7
102	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	6
103	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	6
104	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	6
105	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	6
106	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	6
107	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	6
108	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
109	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	2
110	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
111	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	1
112	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	2
113	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	7
114	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	8
115	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	7
116	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	7
117	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	6
118	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	6
119	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	5
120	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	5
121	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	6
122	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	6
123	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	7

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
124	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	5
125	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	5
126	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	7
127	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	5
128	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
129	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
130	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	7
131	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	10
132	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	7
133	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	7
134	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	4
135	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknologi Informasi	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	4
136	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
137	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	2
138	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	2
139	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	2
140	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	2
141	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Deputi Bidang Investigasi	2
142	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	2
143	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1
144	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	2
145	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	2
146	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	2
147	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	2
148	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	2
149	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1
150	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
151	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1
152	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1
153	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
154	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1
155	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	2
156	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	2
157	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	2
158	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	2
159	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	2
160	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	2
161	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	2
162	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	2
163	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1
164	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
165	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
166	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	2
167	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	2
168	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	2
169	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2
170	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
171	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
172	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	2
173	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	2
174	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	2
175	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	2
176	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	2
177	Auditor Ahli Pertama - Rumpun Teknik Sipil	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	2
178	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
179	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
180	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
181	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
182	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1
183	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
184	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
185	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
186	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
187	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
188	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Biro Hukum dan Komunikasi	9
189	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	1
190	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
191	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	1
192	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1
193	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Deputi Bidang Akuntan Negara	1
194	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Deputi Bidang Investigasi	1
195	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Inspektorat	1
196	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	1
197	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	1
198	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	1
199	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Pusat Informasi Pengawasan	1
200	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Penyandang Disabilitas	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	1
201	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	2
202	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	2
203	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	2
204	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
205	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1
206	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
207	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
208	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1
209	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
210	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	2
211	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	2
212	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	2
213	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	2
214	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
215	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
216	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
217	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
218	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1
219	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
220	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
221	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	2
222	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	2
223	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
224	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
225	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
226	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
227	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
228	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
229	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
230	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
231	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
232	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
233	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
234	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1
235	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
236	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
237	Analis Anggaran Ahli Pertama	Umum	Biro Keuangan	5
238	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	1
239	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1
240	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	1
241	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
242	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	1
243	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Deputi Bidang Investigasi	1
244	Statistisi Ahli Pertama	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	2
245	Analis Hukum Ahli Pertama	Umum	Biro Hukum dan Komunikasi	5
246	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Biro Sumber Daya Manusia	1
247	Konselor Sumber Daya Manusia	Penyandang Disabilitas	Biro Sumber Daya Manusia	1
248	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	1
249	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1
250	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
251	Konselor Sumber Daya Manusia	Penyandang Disabilitas	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
252	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1
253	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1
254	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	1
255	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1
256	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
257	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
258	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
259	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
260	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
261	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
262	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
263	Konselor Sumber Daya Manusia	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
264	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola	1
265	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Biro Sumber Daya Manusia	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
266	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Biro Keuangan	7
267	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Penyandang Disabilitas	Biro Keuangan	2
268	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Biro Hukum dan Komunikasi	1
269	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Penyandang Disabilitas	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	1
270	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	1
271	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1
272	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	1
273	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1
274	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	1
275	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Deputi Bidang Investigasi	1
276	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Penyandang Disabilitas	Inspektorat	1
277	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2
278	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Penyandang Disabilitas	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2
279	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Pusat Informasi Pengawasan	1
280	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	1
281	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
282	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Penyandang Disabilitas	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
283	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
284	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1
285	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
286	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
287	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
288	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
289	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
290	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
291	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
292	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
293	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
294	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1
295	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
296	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola	1
297	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Biro Sumber Daya Manusia	1
298	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Biro Keuangan	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
299	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Biro Hukum dan Komunikasi	7
300	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	1
301	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	2
302	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	2
303	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	2
304	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	2
305	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	2
306	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Deputi Bidang Investigasi	2
307	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Inspektorat	2
308	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	4
309	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	2
310	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Pusat Informasi Pengawasan	1
311	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	2
312	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	1
313	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1
314	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
315	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
316	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
317	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1
318	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	2
319	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1
320	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1
321	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	2
322	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
323	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
324	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
325	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
326	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1
327	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
328	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
329	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1
330	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
331	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
332	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
333	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
334	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
335	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
336	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
337	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
338	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
339	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
340	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
341	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1
342	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
343	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kehumasan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
344	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola	1
345	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Biro Sumber Daya Manusia	1
346	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Biro Hukum dan Komunikasi	11
347	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Penyandang Disabilitas	Biro Hukum dan Komunikasi	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
348	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	1
349	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1
350	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	1
351	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1
352	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	1
353	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Bahan Bantuan Hukum	Umum	Deputi Bidang Investigasi	1
354	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	5
355	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2
356	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	2
357	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	1
358	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	2
359	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1
360	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
361	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
362	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
363	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
364	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
365	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
366	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
367	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
368	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1
369	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
370	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
371	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1
372	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
373	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
374	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
375	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
376	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
377	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
378	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
379	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
380	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
381	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
382	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1
383	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
384	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis BMN dan PBJ	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
385	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Pendidikan dan Pelatihan	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	5
386	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1
387	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
388	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
389	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
390	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
391	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
392	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
393	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
394	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
395	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
396	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
397	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
398	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
399	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Biro Sumber Daya Manusia	2
400	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penyandang Disabilitas	Biro Sumber Daya Manusia	1
401	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	1
402	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1
403	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	1
404	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1
405	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	1
406	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Deputi Bidang Investigasi	1
407	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penyandang Disabilitas	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2
408	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	1
409	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Pusat Informasi Pengawasan	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
410	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	1
411	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1
412	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1
413	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
414	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1
415	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
416	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1
417	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1
418	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penyandang Disabilitas	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
419	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
420	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
421	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
422	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
423	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
424	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
425	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
426	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1
427	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
428	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
429	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
430	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
431	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
432	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
433	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
434	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
435	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
436	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
437	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1
438	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
439	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
440	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	18
441	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola	1
442	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Biro Sumber Daya Manusia	2
443	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Biro Keuangan	1
444	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Biro Hukum dan Komunikasi	1
445	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	7
446	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	2
447	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	2
448	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	2
449	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
450	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Deputi Bidang Akuntan Negara	2
451	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Deputi Bidang Investigasi	2
452	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Inspektorat	1
453	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	1
454	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	1
455	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Pusat Informasi Pengawasan	1
456	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	1
457	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
458	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1
459	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
460	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1
461	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1
462	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
463	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
464	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
465	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
466	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
467	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
468	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
469	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
470	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1
471	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
472	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
473	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
474	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
475	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
476	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
477	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
478	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
479	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
480	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
481	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1
482	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
483	Pengolah Data dan Informasi - Sekretaris	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
484	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	1
485	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	1
486	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan	1
487	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Pusat Informasi Pengawasan	1
488	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	2
489	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1
490	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1
491	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
492	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1
493	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
494	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1
495	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1
496	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
497	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	2
498	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	2
499	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	2
500	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	2
501	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	2
502	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	2
503	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
504	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Penyandang Disabilitas	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
505	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	2
506	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
507	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
508	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	2
509	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	2

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
510	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	2
511	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2
512	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2
513	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	2
514	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	2
515	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	2
516	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	2
517	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	2
518	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Layanan Umum	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	2
519	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Aceh	1
520	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1
521	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1
522	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1
523	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1
524	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1
525	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1
526	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
527	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1
528	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1
529	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1
530	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	1
531	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1
532	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1
533	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1
534	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1
535	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1
536	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1
537	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1
538	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1
539	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
540	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1
541	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
542	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
543	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1
544	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1
545	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1
546	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1
547	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
548	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1
549	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1
550	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1
551	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1
552	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1

No	Jabatan	Formasi	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
553	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	1
554	Penata Keprotokolan	Umum	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	1
TOTAL				**2.007**